

# DIMENSI-DIMENSI MASYARAKAT MADANI: MEMBANGUN KULTUR ETIKA SOSIAL

**Imam Mawardi**

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Email: mawardirazal@ummgl.ac.id

## ABSTRAK

*Fenomena masyarakat madani merupakan refleksi kritis dari situasi terpuruknya citra masyarakat yang mengharapkan suatu tatanan masyarakat ideal, dan dinamika yang dibangun merupakan kesadaran masyarakat untuk menempatkan etika sosial sebagai sebuah piranti di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan pada bahasan historisitas dalam mewujudkan visi yang ideal dari suatu masyarakat dengan bangunan etika sosial berdasarkan dimensi yang menyertai bangunan masyarakat madani, yaitu antara lain dimensi agama, dimensi budaya, dimensi ekonomi, dimensi politik dan dimensi pendidikan, sehingga setidaknya mampu memberi gambaran paradigmatis dalam mengembangkan masyarakat yang diharapkan.*

**Kata Kunci:** *Dimensi, Masyarakat Madani, Etika Sosial*

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah wacana, masyarakat madani merupakan produk pengalaman sejarah kemasyarakatan yang dimunculkan sebagai suatu paradigma dalam membentuk tata kemasyarakatan yang ideal. Istilah “madani” biasanya diambil dari kata “madinah” dan digunakan sejak beberapa abad yang lalu dalam arti “civil”, beradab, dan istilah yang kemudian digunakan biasanya merujuk pada *tamaddun*, *civilization* (Schumann, 1999:65), yang artinya lebih mengacu pada penciptaan peradaban. Dengan demikian masyarakat madani merupakan masyarakat yang berperadaban (*bermadaniyah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan (Madjid, 1999:21). Dari pengertian ini masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota yaitu masyarakat yang beradab dan modern adalah hasilnya (Rahardja, 1996).

Dinamika masyarakat madani dalam tulisan ini akan mengulas sedikit historitas konsep pemaknaan masyarakat madani dalam hubungannya dengan civil society dan

istilah-istilah lain yang komprehensif. Sebagai sebuah paradigma ideal dipaparkan pula kultur etika sosial yang mewarnai dimensi agama, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Dari dimensi-dimensi tersebut selanjutnya dibangun dan diakomodasi dalam suatu visi masyarakat madani.

### **MASYARAKAT MADANI: HISTORISITAS KONSEP PEMAKNAAN**

Diskursus tentang masyarakat madani sendiri tidak memiliki runtutan histories yang jelas, banyak para ahli menyandarkan pada sejarah awal perkembangan Islam, yaitu saat nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib dan merubahnya menjadi kota Madinah. Di Madinah ini Nabi saw membuat tata aturan kemasyarakatan yang mengikat seluruh warga dengan suatu dokumen perjanjian yang disebut *Mitsasaq al-Madinah* (piagam madinah) (Bellah, 1976:150-151). Meskipun isi perjanjian ini baik dan dapat mengikat warga Madinah yang pluralistik saat itu, namun kalau diteliti lebih lanjut isi perjanjian ini belum dapat dikatakan bersifat egaliter diantara sesama warga, masih ada kecenderungan mengutamakan salah satu golongan, Muslim (Pulungan, 1996). Dengan demikian tidaklah tepat piagam madinah sebagai representasi ideal masyarakat madani (*civil society*) sebagaimana yang dicita-citakan saat ini.

Konsep masyarakat madani yang bergulir di Indonesia dan merupakan istilah temuan kontemporer sebagai terjemahan *civil society* (Rahardja, 1999:8). Oleh karena itu, kajian masyarakat madani tidak dapat dipisahkan dari konsep *civil society* yang berkembang di Barat. Asrori S. Karni (1999: 21-28) mengakumulasikan *civil society* ke dalam lima model pemaknaan sesuai dengan konteks historisitas tempat pemikiran itu diterapkan. **Pertama**, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan. Pemahaman demikian dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679), dan Jhon Locke (1632-1704). **Kedua**, *civil society* dipahami sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan kebalikan dari masyarakat primitif/barbar. Visi etis ini untuk memelihara tanggung jawab sosial yang terilhami oleh sentimen moral antar masyarakat secara alamiah. Konsep ini dikembangkan oleh Adam Ferguson (1767) pada paruh abad ke-18. **Ketiga**, *civil society* dimaknai sebagai antitesis negara dan atau sebagai alat kontrol negara. Pemahaman ini dikembangkan oleh Thomas Paine (1792). **Keempat**, *civil society* dimaknai sebagai elemen ideologi kelas dominan, yang dikembangkan oleh Hegel, Marx, dan Gramsci.

*Kelima*, *civil society* dimaknai sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara yang bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang tinggi untuk menahan kecenderungan intervensi negara, bahkan menjadi sumber legitimasi negara dan mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflective force*) untuk mengurangi derajat konflik dalam masyarakat sebagai akibat reformasi sosial. Model ini dikembangkan Alexis'de Toqueville.

Dari kelima pemahaman ini, konsep kedua dan kelima merupakan konsep yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena itu, pengembangan masyarakat lebih diutamakan dengan membangun visi etis sosial kemasyarakatan yang berdasarkan nilai-nilai luhur budaya yang telah ada di dalam pranata masyarakat sebagai alat kontrol penyeimbang kekuatan negara.

Hakekat pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan citra negara yang demokratis, yang unsur-unsurnya antara lain: (1) adanya kemauan politik dari negara (*state*), (2) adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*) dan adanya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat, mandiri dan beradab. (Abdillah, 1999). Unsur-unsur ini tidak akan berarti bila hanya merupakan konsep ideal tanpa legitimasi yang menyertai landasan, asas, atau suatu wawasan kemasyarakatan yang dapat disetujui dan diterima bersama. Meskipun dalam esensinya antara *civil society* dan masyarakat madani sama, namun hal yang membedakan pada penempatan agama dalam masyarakat. Agama dalam konsep masyarakat madani menjadi sentral ikatan sumber moral yang mewarnai dimensi-dimensi kemasyarakatan dan menjadi landasan dalam bernegara, maka dapatlah dipahami bahwa:

Dalam suatu masyarakat madani yang modern, semua umat yang ber-*din* baik pertama-tama dalam kalangan sendiri maupun bersama-sama mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang mereka junjung tinggi, sehingga kemudian dalam suatu dialog sosial-kemasyarakatan yang bermakna dan bermutu nilai-nilai dan norma-norma itu dikembangkan menjadi kaidah-kaidah yang melandaskan suatu masyarakat madani yang inklusif yang menjadi "*madinah*", "*gemeinwesen*", atau "*home*" bagi semua yang tinggal dalam wilayahnya (Schumann, 1999:72).

Dalam perspektif Islam—menurut Ali Syariati (1979:19)—masyarakat yang ideal disebut *ummat*, sebuah kata yang sarat dengan semangat progresif serta mengandung pandangan sosial yang dinamis, komited dan ideologis. Dengan demikian *ummat* ialah suatu masyarakat yang sejumlah individunya mempunyai keyakinan dan

tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud untuk bergerak maju kearah tujuan bersama, karena Islam telah menggariskan pertanggungjawaban intelektual serta gerakan bersama sebagai landasan filsafat sosialnya. Demikian juga sistem sosialnya didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta hak milik ditempatkan di tangan masyarakat.

Masyarakat ideal yang digambarkan di atas merupakan masyarakat yang seimbang (*ummatan wasathan*) (Q.S Al Baqorah; 143) dari segala kehidupannya sehingga memberikan makna egaliter bagi kebersamaan umat membangun masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*) yang senantiasa menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) (Q.S Ali Imran: 110) serta menjaga persatuan tidak bercerai berai dan berselisih (Q.S Ali Imran: 105). Demikianlah sehingga tercapai masyarakat moderat (*ummat muqtashidah*) (Q.S Al maidah: 66) yang jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Dari perspektif Islam di atas, menunjukkan bahwa masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan agama sebagai sumber moral, inspirasi dan aksi dalam tatanan kehidupan masyarakat atas kebersamaan sosial untuk hidup secara damai penuh demokratis dan toleransi—bukan atas kepentingan kelompok atau pribadi—sehingga terwujud masyarakat yang etis, egaliter dan berbudaya. Maka pantaslah sebagaimana dikatakan Bachtiar Alam (1999), bahwa masyarakat Madani (*civil society*) yang ingin diwujudkan adalah wilayah kehidupan social yang terletak diantara “negara” dan komunitas lokal dimana dalam keduanya terhimpun kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Artinya kekuatan yang dihimpun itu selalu berada pada spektrum perubahan dinamika masyarakat itu sendiri sesuai dengan tuntutan zaman dan didasarkan pada etika sosial bahwa kemandirian dan kebebasan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, perwujudan masyarakat madani harus mempertimbangkan setidaknya dua hal utama, yaitu legitimasi negara dan terciptanya masyarakat mandiri yang berpijak di atas fondasi moral yang kokoh (Arifin, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat madani bukanlah masyarakat anti negara atau masyarakat tak bernegara tetapi masyarakat yang hidup dalam negara *legitimit* yang mampu

membangun entitas sosial dan dapat memberi jaminan masyarakat dalam mengaktualisasikan potensinya untuk berkembang secara aman dan penuh kedamaian dengan fondasi moral yang memberi batasan-batasan tata aturan etika yang jelas dan mengikat, sehingga keharmonisan terjaga dan terhindar dari berkembangnya negara yang otoriter dan diktator. Di samping itu, yang penting juga adalah penciptaan masyarakat mandiri yang dapat menjalankan fungsi *social control* terhadap negara. Bukan malah sebaliknya, pemerintah mengontrol kebebasan dan kemerdekaan demokrasi masyarakat sebagai manifestasi sentralisasi kekuasaan yang absolut sehingga masyarakat mengalami ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Lebih lanjut, secara ideal masyarakat madani bukan hanya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (*pluralisme*). (Abdillah, 1999) Sehingga atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti itu masyarakat akan mampu membangun suatu *polity* (pemerintah, masyarakat negara) yang demokratis. Ketiadaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip akan menghasilkan masyarakat madani yang semu tempat primordialisme dan partikularisme menjadi lazim (Hikam, 1999:45).

Dengan demikian prasyarat untuk membangun suatu kehidupan yang egaliter, kosmopolit, dan penuh konsesus yang didasarkan pada saling pengertian adalah mentradisikan nilai-nilai budaya masyarakat madani yang berfungsi sebagai infrastruktur yang fundamental bagi kehidupan baru yang mencerminkan wawasan nilai-nilai demokratik yang luwes. Karena masyarakat madani tidak akan terwujud tanpa proses transmisi kebudayaan, yang didalamnya sangat berperan fungsi pendidikan bagi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan.

## **MASYARAKAT MADANI: MEMBANGUN KULTUR ETIKA SOSIAL**

Pluralisme dan heterogenitas masyarakat dalam hal etnis, bangsa, suku, perekonomian, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan merupakan satu kondisi yang menyebabkan tiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan cita-citanya sesuai dengan filsafat hidup yang dipegangnya, tentunya dipengaruhi oleh keyakinan, budayanya dan tuntutan situasional. Jelasnya hal ini memerlukan pemikiran, penataan, dan pengendalian sosial secara bijak untuk

menghindari adanya perbedaan yang membawa kepada perpecahan diantara golongan-golongan yang ada dalam pluralisme masyarakat tersebut. Mengingat mewujudkan masyarakat madani diperlukan terciptanya rasa aman dan damai serta ditegakkannya keadilan yang menyeluruh diantara warga masyarakat.

Bangunan masyarakat madani merupakan suatu proses yang aktif bukan pasif, karena adanya “dinamika sosial” yang lebih dicirikan oleh dinamika hubungan antara struktur dan nilai yang ada didalamnya. Dan juga lebih tepat digunakan karena profil masyarakat madani berkaitan dengan konteks temporal dan spasial, artinya akan memunculkan wajah yang berlainan antar kurun waktu yang berbeda, dan juga berlainan pada tempat yang berbeda (Ahmad W. Pratiknya dalam Yusuf, 1995:138).

Pengembangan etika sosial dalam masyarakat madani setidaknya memperhatikan dengan serius dimensi-dimensi yang ada. Mengingat bangunan masyarakat madani mengandung pandangan sosial yang dinamis, komited dan ideologis dengan semangat progresif yang tinggi untuk senantiasa berproses dan berkembang di dalam suatu “rumah” negara. Dimensi-dimensi tersebut berwujud pada penataan dan pengaturan sistem yang ada dalam bangunan masyarakat madani, terutama sekali pada dimensi-dimensi antara lain: dimensi agama, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan.

### **1. Dimensi Agama**

Peran agama dalam masyarakat Madani menempati peran yang utama. Dalam pandangan sosiologis, menurut Pdt. Bernard T. Adeney-Risakotta, Ph.D (1998), agama bisa dilihat dari dua segi, yaitu: *pertama*, agama-agama selalu mengajar prinsip moral yang tinggi dan menjunjung tinggi disiplin, kerja keras dan kebajikan sosial lain yang mendukung stabilitas dan keamanan masyarakat. Artinya, agama mengikat masyarakat secara bersamaan dan menciptakan simbol-simbol yang mengekspresikan visi paling mulia dari suatu masyarakat sehingga masyarakat diajar oleh agama menjadi pasrah dan tunduk kepada pemerintah. *Kedua*, agama berperan sebagai semangat luar biasa kuat untuk perubahan sosial. Agama yang dinamis dan kreatif ini, tidak menjaga *status quo*, tetapi menyampaikan visi sosial masyarakat sebagai bagian kontrol pemerintahan yang bisa mengkritik dan mengevaluasi sistem pemerintahan. Agama seperti ini tidak menjaga stabilitas dan keamanan tetapi justru menggoyang stabilitas dan mungkin membuka pintu untuk revolusi. Dari dua sisi pandangan tersebut di atas, agama seakan-akan menempati dualisme yang dilematis.

Oleh karena itu lebih penting adalah menempatkan peran agama pada posisi yang seimbang antara *idealisme* dan *realisme* keagamaan.

Di sisi lain terlepas dari permasalahan di atas, tantangan kultural keagamaan yang paling mendesak saat ini yakni bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih santun dan juga membebaskan masyarakat dari kungkungan kesengsaraan sosial dan rohaniah. Oleh sebab itu menurut Weber diperlukan suatu bentuk penerjemahan ide-ide keagamaan yang ideal itu dalam kehidupan praktis sambil memperhitungkan segala kendala tradisi atau kapasitas formal yang ada dalam masyarakat. (Abdurrahman, 1995:9). Nampaklah bahwa peran agama bukan saja *amar ma'ruf nahi mungkar*, tetapi juga adanya kekritisian terhadap perubahan-perubahan dinamika masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran komitmen kepada pluralisme dan menjaga toleransi sebagai permasalahan yang prinsip, bukan hanya prosedural semata. Oleh karena itu, sikap dan perilaku harus didasarkan pada moralitas agama yang otentik dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan etika sosial bukan berperilaku dengan hanya menuruti peranan sosiologisnya yang menimbulkan sentimen kelompok, baik kelompok keagamaan, kesukuan, kedaerahan, dan lain sebagainya, tapi pada kepentingan bersama berdasarkan asas keadilan sosial dan juga sikap menghargai perbedaan dengan pangkal tolak utama terwujudnya demokrasi dalam masyarakat yang bermoral.

Timbulnya konflik di tengah masyarakat, baik konflik keagamaan maupun konflik sosial karena agama hanya berperan sebagai ritual semata tanpa dipahami makna substansi ajarannya. Padahal kalau ditelusuri agama bisa menjaga sumber moral yaitu: *Pertama*, mendahulukan tanggung jawab sosial; *kedua*, mengajarkan kearifan hidup berdasarkan perintah Tuhan. Dengan dua alasan ini agama akan terintegrasikan dengan berbagai problematika sosial yang ada dalam masyarakat disertai basis ketaqwaan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan. Atas dasar ini Machasin (1998) mengusulkan untuk mengembangkan suatu teologi yang bersifat apresiasif terhadap ajaran agama lain. Hal ini menurutnya akan dapat mengubah sikap bermusuhan menjadi sikap bekerja sama dan saling menghormati melalui:

- a. Kesadaran bahwa masyarakat terdiri dari berbagai pemeluk agama yang berbeda dan kebersamaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan untuk menjaga ketentraman kehidupan.

- b. Kontak yang sering terjadi, walaupun mungkin tidak sampai pada belajar tentang ajaran agama lain.. Yang penting adalah adanya kesempatan untuk bertemu sehingga kelihatan bahwa orang lain tidak mesti berupa lawan.
- c. Informasi yang adil tentang agama lain. Mungkin ini merupakan kelanjutan kontak di atas, namun bisa juga ini terjadi karena banyaknya media massa yang tidak mengenal batas kelompok.
- d. Sikap pemerintah, seperti negara Pancasila kita, yang tidak memperlakukan umat-umat beragama dengan berat sebelah.
- e. Pendidikan yang tidak hanya mempertemukan beberapa anak pemeluk agama yang berbeda-beda, namun juga mencerahkan pikiran dan memungkinkannya untuk membuka diri terhadap orang lain.

Dapatlah dipahami bahwa dalam suatu masyarakat madani yang modern, semua pemeluk agama dalam kalangan sendiri maupun secara bersama mengembangkan nilai-nilai dan norma kemasyarakatan yang mereka junjung tinggi, dan kemudian dengan cara dialog sosial kemasyarakatan, nilai-nilai dan norma-norma itu ditingkatkan menjadi kaidah-kaidah yang mendasari suatu masyarakat madani yang inklusif. Artinya agama atas dasar sumber moral tersebut— sebagaimana dikatakan Clifford Geertz— menjadi “sistem makna” (Tibi, 1999:2) bagi landasan perikehidupan yang penuh kedamaian. Jadi, agama di sini tidak hanya dipahami sebagai rumusan hukum-hukum melainkan sebagai wawasan nilai-nilai etika dan yuridis yang dapat menjadi pedoman hidup dalam pelbagai situasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga apabila disebutkan nilai-nilai etika dan yuridis dimaknai dalam “civil religion” atau “agama madani” maksudnya adalah suatu hasil pergumulan bersama atau “dialog” sosial keagamaan, yang diwujudkan oleh manusia yang masing-masing berakar dalam agamanya, dan yang bertekad untuk mendasarkan masyarakat mereka atas kaidah-kaidah luhur yang dapat mereka setuju bersama (Schumann, 1999:73-74).

## **2. Dimensi Budaya (*cultural*)**

Budaya atau kultural merupakan sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Abdurrahman, 1995:173) yang pada level terendah mengandung makna suatu kesadaran intuitif dari identitas nilai yang harus diwujudkan. Sedangkan pada level tertinggi, kesadaran



akan nilai ini menyiratkan pengetahuan yang luas akan nilai-nilai, hubungan timbal balik dan tingkatan-tingkatannya, dan sejarah proses perkembangan yang dengannya akan dicapai perwujudan kesemestaan nilai itu (Al-Faruqi, 1993:7). Wilayah budaya sebagai tempat eksistensi kebudayaan merupakan sebuah persekutuan yang anggota-anggotanya mentaati suatu kerangka ide dan nilai-nilai yang sama untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan menghindari adanya anarki (Abdurrahman,1995:173). Oleh sebab itu dalam wilayah budaya ini terdapat ketentuan-ketentuan hukum dan tata aturan untuk mengarahkan berbagai kebiasaan yang menjadi konsesus dan mengontrol konflik-konflik yang timbul didalamnya, sehingga dalam wilayah budaya ini mempunyai kesamaan konsesus antara anggota-anggotanya untuk menciptakan konsep moral tentang baik dan buruk, bermanfaat atau merugikan.

Hal ini sebagaimana digambarkan Edward B Taylor dalam bukunya *Primitive Culture* yang terbit tahun 1871 yang di kutip Tilaar (1999:39) sebagai berikut:

“Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat“.

Dari definisi yang sederhana ini akan berimplikasi dalam usaha mendapatkan pengertian yang jelas mengenai hakekat kebudayaan yaitu, *pertama*, adanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat, *kedua*, adanya proses pemanusiaan dan *ketiga*, dalam proses pemanusiaan itu terdapat suatu visi tentang kehidupan (Tilaar, 1999:39). Ketiga hakekat kebudayaan di atas merupakan unsur kebudayaan yang harus ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat dan pandangan mengenai hidup. Hal ini nampaknya satu peranan yang diemban pendidikan. Proses transmisi yang berupa imitasi, identifikasi dan sosialisasi merupakan suatu tantangan, bagaimana pengaruh luar yang masuk dan mempengaruhi masyarakat dapat tersaring, sehingga budaya yang dipengaruhi tidak merubah status nilai-nilai yang dipertahankan tetapi malah memperluas cakrawala untuk mewujudkan nilai-nilai global yang diwujudkan dalam etika sosial.

Di dalam proses pembudayaan, nilai kebudayaan tidak sekedar ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga merupakan proses interaksi yang setiap pribadi merupakan pribadi yang kreatif dan inovatif.

Proses pembudayaan ini merupakan proses dari hakekat pendidikan untuk memberdayakan masyarakat dan sebagai penjaga gawang nilai-nilai budaya dalam masyarakat, maka hal-hal yang berkenaan dengan proses pemberdayaan meliputi: (1) Penemuan dan Invesi (*discovery and invention*) (2) Difusi artinya pembaruan budaya-biudaya tertentu (3) Akulturasi, (4) Asimilasi, (5) Inovasi, (6) Fokus yaitu adanya kecenderungan di dalam kebudayaan ke arah kompleksitas dan variasi yang menekankan aspek-aspek tertentu (7) Krisis dan (8) Visi masa depan (Tilaar, 1999:39). Kedelapan hal tersebut di atas tentunya sebagai sesuatu kemutlakan tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya kemajuan perkembangan budaya yang pesat dengan teknologi yang canggih baik dari proses kreatif maupun akulturasi harus tetap menjaga nilai-nilai moral sosial. Karena maju mundurnya suatu bangsa ditentukan bagaimana memelihara nilai-nilai etika dalam kehidupan, hal inilah menunjukkan wujud bangsa yang berbudaya (masyarakat madani) yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai sosial.

### 3. Dimensi Ekonomi

Kerangka dasar masyarakat madani ialah ekonomi (Syariati,1979:119) dengan sistem sosial yang didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta dilandasi dengan etika dan moral ekonomi, yaitu sifat yang tidak pernah mengkompromikan antara yang diperbolehkan (*halal*) dengan yang dilarang (*haram*) (Al-Buraey, 1986:194) tetapi etika ekonomi yang membolehkan hal-hal yang baik dan melarang yang buruk (Q.S. 7:157).

Sistem ekonomi yang dikembangkan dalam masyarakat madani bukanlah sistem liberalisme atau kapitalisme, dan bukan pula system sosialisme murni, yang membawa masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Tetapi merupakan sistem yang bercirikan kewarganegaraan (*citizenship*), persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), kegotongroyongan (*collectivism*) dan masyarakat korporat, yakni sistem ekonomi yang didukung oleh dan mencerminkan kepentingan semua kelompok (M. Dawam Rahardja dalam Yusuf dkk, 1995:122), sehingga dapat dikatakan bercorak sosial ekonomi.

Di Indonesia sendiri terkenal dengan istilah *kertaraharja*, *gemahripah lohjinawi* yang menggambarkan suatu masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan berkelimpahan, sekalipun dalam citra masyarakat agraris. Karena itulah—

sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945—tujuan negara Indonesia salah satunya adalah terwujudnya citra masyarakat yang adil dan makmur, yakni masyarakat yang memenuhi keadilan sosial dan berkecukupan.

Dalam ajaran Islam, sistem ekonomi yang dikembangkan tidak bisa dilepaskan dari etika sosial, sebagaimana digambarkan seorang sarjana muslim Nyang yang dikutip Muh. A. al-Buraay (1986:181-182):

...Islam memandang seluruh upaya manusia memiliki makna rohaniah dan jasmaniah sekaligus. Apabila kaum kapitalis sangat memuji atau mengutuk suatu sistem ekonomi hanya atas dasar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh, maka seorang muslim akan memandang ekonomi dengan landasan moralitas... Demikian pula, apabila kaum marxis memusatkan perhatiannya pada proses produksi dan distribusi dari sistem ekonomi, maka Islam lebih menekankan pada moralitas dan spiritualisasi dari proses yang sama.

Dengan landasan moral dan spiritual, Islam memotivasi tindakan sosial dan ekonomi sehingga tidak muncul ketamakan dan kerakusan. Islam mendorong kebaikan bersama dengan mempersatukan tatanan sosial dalam persaudaraan sehingga kaum lemah didalamnya sangat dilindungi. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan masyarakat madani salah satu alternatif adalah upaya untuk melahirkan “moralisasi sistem ekonomi”. Dengan moralisasi ini akan menekankan pentingnya solidaritas di kalangan masyarakat, artinya kesejahteraan masyarakat dilakukan dalam bentuk keadilan distributif, yaitu dengan menekankan upaya pemberdayaan manusia melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan, rehabilitasi dan kebijaksanaan tenaga kerja.

#### **4. Dimensi Politik dan Hukum**

Dimensi politik dalam masyarakat madani senantiasa mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara. Kelembagaan ini di dukung oleh sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang sama memberikan legitimasi kepadanya. Oleh sebab itu lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukum sebagai alat kontrol yang terdiri dari norma-norma yang menjadi pegangan anggota masyarakat bertindak. Artinya masyarakat dapat dijamin oleh hukum, apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah, sistem hukumlah yang menjawabnya.

Franz Magnis-Suseno (1999:21), mengilustrasikan posisi hukum dalam negara sebagai berikut:

Hukum sebagai lembaga masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga pelaksana masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia. Atau secara singkat: etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Sepintas saja kelihatan bahwa dua-duanya seharusnya tidak terpisah. Hukum tanpa negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka; hukum tidak mempunyai suatu kemampuan untuk bertindak. Sedangkan negara tanpa hukum adalah buta dan merosot ketingkat sub-manusiawi, karena tidak lagi berdasarkan tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaannya di luar hukum sama seperti manusia yang berbuat tanpa pengertian. Negara semacam itu menjadi negara penindas dan irasional.

Dengan demikian system politik mempunyai legitimasi hukum dan sebagai kekuatan untuk mengatur masyarakat. Artinya berdasarkan etika politik, negara dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral) (Suseno, 1999:21)

Dalam Islam tidak terdapat pemisahan antara politik dan etika (moralitas). Hal ini dikarenakan tatanan politik yang dibangun masyarakat bahwa seluruh perilaku individu dalam masyarakat, selalu taat dan patuh pada tatanan politik, sehingga dapat mengetahui dan membedakan perilaku politik yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dengan perilaku yang mendatangkan keburukan dan kerugian. Dengan kemampuan membedakan tersebut, seseorang akan dapat menuntun negara mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi warganya (Al-Buraey, 1986:156-157).

Dalam penerapannya, makna politik sekurang-kurangnya dibedakan menjadi dua hal, *Pertama*, politik praktis, yang mengandung kegiatan politik yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional. *Kedua*, sosialisasi politik atau pendidikan politik mengandung makna proses peningkatan kesadaran warga Negara agar mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini berjalan secara kultural dan wajar tanpa mengganggu dan merusak tatanan politik yang ada (Yusuf, 1995:74-75)

Dimensi politik dan hukum, dapat menjadi penentu kekuatan masyarakat dan sebagai alat penentu kebijakan pemerintah untuk mengatur tata kemasyarakatan. Dengan landasan moral-etika, sistem politik dan hukum menjadikan negara-negara menuju tata kehidupan yang menegakkan keadilan dan kebenaran, *amar ma'ruf nahi munkar*.

## 5. Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang mewarnai dimensi-dimensi dalam masyarakat baik segi ekonomi, sosial politik, hukum, budaya dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pendidikan memegang fungsi dialektik terhadap masyarakat, artinya pendidikan selain menjadi bagian masyarakat juga mempengaruhi masyarakat, dan hasil dari pengaruh pada masyarakat itu berpengaruh lagi pada pendidikan (Bernadib, 1996:15).

Keterkaitan pendidikan dengan masyarakat, dapat diamati *pertama*, bahwa antara masyarakat dan pendidikan saling merefleksi. Masyarakat mempunyai kebudayaan, kebudayaan pun mereflesikan pada pendidikan. *Kedua*, masyarakat dalam hal biasa (konkrit) ataupun dalam rangka berubah dan berkembang menghendaki peranan pendidikan untuk membawa perubahan dan perkembangan itu, dan *ketiga*, masyarakat yang telah berfungsi seperti yang dikembangkan oleh pendidikan itu selanjutnya merefleksi lagi terhadap pendidikan, dan pendidikan mempunyai tugas untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat madani, peranan pendidikan menjadi sangat efektif. Karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memaksa setiap bangsa untuk mengejar ketertinggalannya dalam segala bidang kehidupan. Untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas, yang mempunyai sifat *inovatif-kreatif* terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka pendidikan memegang peranan kunci dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Bangunan pendidikan masyarakat, pada dasarnya merupakan akumulasi individu-individu terdidik dari anggota masyarakat. Individu-individu terdidik di sini merupakan hasil olahan “sekolah kehidupan” yang ditempa oleh lingkaran budaya dan akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sebenarnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dirasakan ketika dihadapkan permasalahan-permasalahan kehidupan. Pendidikan yang diperoleh baik melalui jalur informal, formal dan nonformal membawa pengaruh terhadap pembentukan kepribadian yang beretika sosial dan setidaknya mampu untuk membedakan manusia dari keterbelakangan menghadapi percaturan global. Artinya dengan pendidikan akan terseleksi manusia-manusia unggul yang siap menghadapi tantangan-tantangan percaturan global. Dari

manusia-manusia yang unggul inilah yang mempengaruhi dan membentuk tradisi baru suatu masyarakat madani. Oleh karena itu, Djohar (1999) menawarkan sepuluh paradigma baru pendidikan, yaitu (1) Pendidikan adalah proses pembebasan, (2) Pendidikan adalah proses pencerdasan, (3) Pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, (4) Pendidikan menghasilkan tindak perdamaian, (5) Pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia, (6) Pendidikan menjadikan anak berwawasan integrative, (7) Pendidikan wahana membangun watak persatuan, (8) Pendidikan menghasilkan manusia demokratis, (9) Pendidikan menghasilkan manusia yang peduli dengan lingkungan, dan (10) Sekolah bukan satu-satunya instrument pendidikan.

Dari paradigma baru pendidikan yang ditawarkan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan sebagai suatu proses yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifat demokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan alamiah, dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, misalnya organisasi sosial keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain), partai-partai politik dan lain sebagainya.

## **VISI MASYARAKAT MADANI**

Di dalam masyarakat madani relasi-relasi individu dalam kelompok sosialnya diikat dengan suatu konsesus moral yang diwujudkan dalam tata aturan hukum. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai alat kontrol pengendalian diri dan sebagai rambu-rambu aktivitas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran masyarakat mentaati konsesus moral dalam segala bidang kehidupan, dimulai dengan prilaku individu di dalamnya apakah sudah mencerminkan kaidah-kaidah etika, sehingga akan menjadi cermin dalam menata kehidupan sosial, sehingga tidak mudah terbawa pengaruh negatif yang menjurus kepada tindakan-tindakan amoral. Baik-buruknya prilaku individu-individu dalam masyarakat mencerminkan peradaban masyarakat itu sendiri.

Relasi-relasi individu dan kelompok sosial di dalam masyarakat madani berupa kesadaran untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, baik dibidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya

disertai dengan keikhlasan yang tulus dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, saling menghormati hak asasi manusia, saling toleransi, dan saling tolong-menolong sebagai perwujudan visi masyarakat madani. Visi yang dikembangkan harus mencerminkan moral etika masyarakat. Moral-etika inilah sebagai landasan menata sistem masyarakat madani. Namun, tanpa ada kemauan yang keras dari individu-individu di dalamnya masyarakat madani hanyalah *utopia*, karena sistem yang di bangun pada dasarnya adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang beretika.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan usaha menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, seperti melepaskan dari kungkungan tradisi yang kaku dan berfikir *progress* dalam mengantisipasi lajunya perkembangan zaman. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah karena adanya daya kekritisan dan seluk beluk tindakannya dan atau dalam melihat kondisi realitas disekitarnya. Dengan daya inilah masyarakat madani menjadi alat kontrol sosial dan penjaga keseimbangan antara pemerintah negara dan warganegaranya. Oleh karena itu, diperlukan suatu visi untuk memperjelas langkah strategis pengembangan masyarakat madani. Visi ini dimaksudkan sebagai wawasan ke masa depan, tidak saja sebagai wacana semata tetapi juga untuk "*the human progress*". Dengan demikian, visi masyarakat madani menjadi paradigma ideal yang telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya terutama sumber daya manusianya.

Visi masyarakat madani berusaha mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat yaitu: (1) Menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia (Q.S Al Isra':70); (2) Memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan manusia (Q.S Al Hujarat:13); (3) Mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin (Q.S Al Maidah:2); (4) Memupuk jiwa toleransi (Q.S Fuslihat:34); (5) Menghormati kebebasan orang lain; (6) Menegakkan budi baik; (7) Menegakkan keadilan (Q.S An Nahl:126); (8) Perlakuan sama (Q.S Al Baqorah:194 dan An Nahl:126); (9) Memenuhi janji (Q.S Al Isra':34); (10) Menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan (Q.S Al Hasyr:9).

Penerapan visi masyarakat madani dilakukan secara menyeluruh artinya dilakukan bagi semua komponen yang ada dalam masyarakat, tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian komponen saja. Dalam khasanah intelektual muslim,

masyarakat madani—bila dikategorikan dengan ummah—menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mempunyai makna universal, tidak hanya dipahami secara eksklusif sebagai entitas se-agama, tapi juga dipahami secara inklusif dimana penekanannya didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan Ali Syariati dan al Qurthubi yang hanya memaknai secara eksklusif yakni sebatas kalangan seagama (Shihab, 1997:395). Dalam pemahaman inklusif inilah masyarakat madani lebih difungsikan untuk (1) Menciptakan kohesi sosial; (2) Memperkuat titik-titik temu kultural, social, politik dan ekonomi diantara berbagai kelompok sosial yang beragama. Bangunan masyarakat madani—sebagaimana diungkapkan Asrori S. Karni (1999)—dilakukan dengan mengembangkan dan menekankan penerapan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam konfigurasi pluralistik, misalnya prinsip toleransi, keadilan, dialog (*syura*), perdamaian, supremasi hukum, persamaan, partisipasi politik, kebebasan beragama, kontrol sosial dan sejenisnya.

Selain berorientasi pada perwujudan tatanan peradaban dalam dimensi social-horisontal, masyarakat madani juga memperhatikan dimensi vertical-trasendental, mengingat problema dalam masyarakat bukan hanya problema sosial-politik semata, tetapi juga problema social-spiritual (Asrori S. Karni, 93-95). Maka, landasan moral spiritual merupakan syarat yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pengembangan masyarakat madani. Hal ini dikarenakan keselarasan kehidupan manusia (masyarakat), perwujudannya apabila mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai moral-spiritual sebagai kekuatan pengontrol tatanan berkehidupan bersama. Jadi, tatanan berkehidupan bersama dengan nilai-nilai sosial dan moral-spiritual haruslah mampu menumbuhkembangkan sikap manusia yang memungkinkan terciptanya masyarakat dengan visi yang jelas. Untuk itulah mengembangkan sikap demokratis tidak bisa ditawar lagi. Dan ini merupakan suatu keharusan bukan hanya mengenal pembentukan yang mempunyai harga diri, yang berbudaya, yang memiliki identitas kebangsaan, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis yang didukung oleh sistem yang juga mengembangkan sifat demokratis.

Di samping sikap demokratis, karena pluralitas masyarakat memerlukan kesadaran saling memahami, menghormati hak-hak masyarakat dan tidak mengganggu antara sesama, maka sikap toleransi merupakan visi tersendiri dalam menumbuhkan saling pengertian, saling mengayomi dan menghargai. Untuk itulah kesadaran



bertoleransi yang tinggi, akan menguatkan ikatan kesatuan masyarakat, sehingga tidak mudah digoyangkan oleh provokasi-provokasi isu-isu sara.

Dengan demikian, visi terbentuknya masyarakat madani pada dasarnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka dalam menyusun konsep masyarakat madani perlu dikembangkan *common dominator* dari setiap unsur perekat masyarakat, sehingga cita-cita untuk mewujudkannya mendapat dukungan dengan pemahaman visi yang sama (M. dawam Rahardja, 1999:32). Akhirnya sebuah masyarakat yang demokratis, konstruktif, inovatif dan egaliter menjadi implikasi etis dari cita-cita masyarakat madani.

Dari visi yang dikemukakan di atas perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan bagi warga masyarakat, demikian juga pemenuhan-pemenuhan sarana pendukungnya baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini sebagai upaya transformasi pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai etika sosial masyarakat madani.

## **PENUTUP**

Dari sisi paradigmatis dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani sebagai dinamika yang mampu menciptakan kohesi sosial dan titik temu kultural dan berorientasi pada perwujudan tatanan peradaban dalam dimensi sosial-horisontal dengan berdasar pada etika sosial di segala segi pergaulan kemasyarakatan, di samping itu masyarakat madani juga memperhatikan dimensi vertical-trasendental, mengingat problema dalam masyarakat bukan hanya problema sosial-politik semata, tetapi juga problema sosial-spiritual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Masykuri, "Islam dan Masyarakat madani". *KOMPAS* (Jakarta), 27 Februari 1999.
- Abdurrahman, Muslim. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Putaka Firdaus, cet.2.
- Alam, Bachtiar. "Civil Society dan wacana Kebudayaan". *KOMPAS* (Jakarta), 28 juni 1999.
- Al-Buraay, Muhammad A. 1986. *Administrative Development: An Islamic Prespective*, Terj. Ahmad Nasir Budiman. *Islam: Landasan Alternatif Afministrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

- Arifin, Syamsul. "Etika Pluralisme dan Konstruksi Masyarakat madani". *REPUBLIKA* (Jakarta), 14 Mei 1999.
- Barnadib, Imam. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bellah, Robert N. 1976. *Beyond Belief*. New York: Happer dan Row.
- Depag RI. 1986. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya Sentra.
- Edward, Paul. (Ed0. 1972. *The Encyclopedia of Philosophi*. New York: Mac Millan Publishing.
- Faruqi, Ismail R. 1984. *Islam dan Kebudayaan*. Terj. Yustiono. Penyunting Jalaluddin Rachmat. Bandung: Mizan.
- Hikam, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3 ES.
- , Muhammad A.S. "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia". *Paramadina*, Vol.1, Nomor 2, 1999.
- Karni, Asrori S. 1999. *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursus "Rumah" Demokrasi*. Jakarta: Logos.
- Machasin. "Islam dalam Budaya Majemuk" makalah Studium General PPs. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 September 1998.
- Madjid, Nurcholis."Azas-Azas Pluralisme dan Toleransi dalam masyarakat madani ". *Makalah seminar nasional*, "Masyarakat Madani dalam Prespektif Agama dan Politik". Oleh IAIN Jakarta, 22 february 1999.
- Rahardja, M. Dawam. "Agama dan Masyarakat Madani". *Makalah seri dialog kebudayaan I: "Agama dan Masyarakat Madani"*. Oleh LSAF dan KOMPAS bekerjasama dengan Paramadina. Jakarta, 13 Desember 1996.
- , "Masyarakat madani di Indonesia: Sebuah penjajagan Awal". *Paramadina*, Vol,1. Nomor 2 Tahun 1999.
- Risakotta, Bernad T. "Telaah Keagamaan dan Rekayasa Sosial Menuju Tatanan Indonesia baru: Pendekatan Seorang Asing Yang Beragama Kristen". *Makalah seminar nasional: "Rekayasa Sosial menuju Tatanan Indonesia baru: Kajian Agama, Pendidikan dan Hukum"*. Oleh fak. Ilmu Agama islam UII. Yogyakarta, 12 Desember 1998.
- Rosana, Dadan. "Paradigma baru Pendidikan menuju masyarakat madani (telaah Kritis Terhadap problem Pendidikan nasional, Arah kebijakan, dan Strategi Pemecahannya)". *Cakrawala Pendidikan*, No.3 th. XVIII, Juni 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2.

- Shihab, dkk. 1977. *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta, Yayasan Bimantara.
- Shumann, Olaf. "Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam". *Paramadina*, Vol.1, No.2, 1999.
- Suseno, Franz Magnis. 1993. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet.5.
- Syari'ati, Ali. 1979. *On The Sociology of Islam*. Diterjemahkan dari bahasa Persia oleh Hamid al-Gar. Barkeley: Mizan Press.
- Tibi, Bassam. 1999. *Islam and The Cultural Accomodation of Change*. Terj. Misbah Zulfah Elizabet dan zainul Abbas. *Islam, Kebudayaan dan perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Tilaar, H.A.R.. 1999. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yusuf, M. Yunan,dkk. (ed). 1995. *Masyarakat Utama; Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Perkasa bekerjasama dengan LPP PP. Muhammadiyah.